

Kebijakan Agama dalam Negara Komunis: Studi Minoritas Muslim di Vietnam

Lailatul Hana¹

¹ Universitas Islam Negeri Profesor K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

lailatulhana73@gmail.com

Abstrack

This study examines religious policies in a country with a communist ideology such as Vietnam with the aim of collecting information on religious policies in Vietnam and the influence of religious policies on the Muslim community as a minority community. In communist ideology, religion is seen as not having an important contribution to the state. Islam as a minority religion in Vietnam is regulated in a more open religious policy but remains within the strict and controlling communist corridor. The control carried out by the government gives the impression of narrow religious freedom in Vietnam. The lack of facilities to develop Islam is motivated by the ideology adopted by Vietnam. This study uses a historical method consisting of four stages, namely; heuristics or collection of sources related to religious policies in Vietnam and their influence on Muslims in Vietnam, source criticism or verification, interpretation and historiography.

Keywords: Muslim Minority, Cham, Religious Policy.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan agama di negara dengan ideologi komunis seperti Vietnam dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai kebijakan agama di Vietnam dan pengaruh kebijakan agama terhadap masyarakat Muslim sebagai masyarakat minoritas. Dalam ideologi komunis, agama dipandang tidak memiliki kontribusi penting bagi negara. Islam sebagai agama minoritas di Vietnam diatur dalam kebijakan agama yang lebih terbuka namun tetap dalam koridor komunis yang ketat dan mengontrol. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kesan sempitnya kebebasan beragama di Vietnam. Kurangnya sarana untuk mengembangkan agama Islam dilatarbelakangi oleh ideologi yang dianut oleh Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu; heuristik atau pengumpulan sumber yang berkaitan dengan kebijakan agama di Vietnam dan pengaruhnya terhadap Muslim di Vietnam, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Kata Kunci: Minoritas Muslim, Cham, Kebijakan Agama.

Pendahuluan

Vietnam dalam konstitusinya menegaskan bahwa mereka adalah negara komunis dengan sistem satu partai yaitu *Communist Party of Vietnam* (CPV). Dalam ideologi komunis, agama dipandang tidak memiliki kontribusi penting bagi negara dan dianggap sebagai sebuah penghalang revolusi (Hasram, 2020). Kemenangan partai Komunis pada tahun 1975 menjadikan agama diposisikan pada ranah pribadi. Kebijakan dan kebebasan beragama pada periode tahun 1975-1986 diakui secara formal namun pada praktiknya agama semakin dibatasi dan pemerintah komunis Vietnam memiliki kendali penuh atas seluruh aktivitas keagamaan (Liên, 2013).

Vietnam yang sebelumnya memegang teguh pandangan Lenin yang berkaitan dengan hubungan *ateisme* dengan komunis kemudian berubah setelah dikeluarkannya kebijakan *doi moi* di tahun 1986, hubungan pemerintah Vietnam dengan agama kemudian mengalami perubahan yang signifikan. keinginan Vietnam untuk melebur ke dalam ekonomi internasional atau *free world market* pada tahun 1986 kemudian menjadikan Vietnam memasuki masa inovasi dengan dikeluarkannya kebijakan inovasi pada bidang ekonomi, budaya dan sosial.

Kebebasan beragama setelah tahun 1986 dinilai belum bebas seutuhnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Komunis Vietnam masih terus dilakukan. Islam sebagai agama minoritas juga mengalami ketatnya pengawasan terhadap kegiatan mereka. Bahkan pada kegiatan keagamaan, pemerintah Komunis akan ikut menghadiri untuk melihat kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan yang dilakukan di masjid. Pengawasan oleh

pemerintah Komunis juga sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan dengan membayar seseorang untuk memata-matai kegiatan keagamaan (Khozin, 2019).

Hubungan komunisme dan agama di Vietnam menjadikan Islam sebagai agama minoritas mengalami dinamika yang menarik. Pengawasan dan kontrol pemerintah Komunis terhadap kegiatan keagamaan masyarakat Muslim di Vietnam menjadi alasan utama mengapa peneliti memilih topik ini. Sebagian besar penelitian mengenai kebijakan agama di Vietnam berfokus pada agama mayoritas di Vietnam seperti Buddha atau Kristen. Penelitian dengan fokus minoritas Muslim diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian dengan fokus kebijakan agama di Vietnam lainnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu; heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pada tahapan heuristik atau pengumpulan sumber, peneliti berupaya untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan agama dan minoritas Muslim di Vietnam. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan agama serta minoritas muslim di Vietnam seperti buku, artikel atau berita. Tahap selanjutnya peneliti akan berusaha untuk memperoleh sumber yang paling asli dan relevan. Dalam tahap ini peneliti melakukan kritik sumber, dengan membaca dan membandingkan sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian sumber-sumber tersebut dikategorikan ke dalam sumber yang paling relevan dengan topik penelitian. Pada tahap selanjutnya yaitu interpretasi, dengan menggunakan

teori hegemoni Antonio Gramsci (Ali, 2017), peneliti dapat melihat bagaimana pemerintah komunis Vietnam sebagai negara dengan ideologi komunis menciptakan dan mempertahankan pengawasan dan kontrol melalui ideologi dan kebijakan agama. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya ditegakkan dengan menggunakan kekerasan tetapi melalui penggunaan ideologi agar masyarakat dapat menerima aturan serta nilai yang ditentukan oleh penguasa.

Permasalahan agama di Vietnam kemudian ditegaskan pada Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Vietnam dengan menyatakan bahwa Partai Komunis Vietnam akan menerapkan kebijakan yang menghormati kebebasan beragama, memimpin dan membantu umat beragama untuk bersatu dalam membangun kehidupan yang baru dan semangat dalam berpartisipasi pembelaan tanah air (Ban Tôn Giáo Chính Phủ, 2022).

Pembahasan

Islam dan Etnis Cham Muslim di Vietnam

Masyarakat Cham merupakan penduduk asli dari Kerajaan Champa yang terletak di Vietnam Tengah yang mulai berkuasa dari abad ke 9 hingga abad ke 15. Islam mulai masuk ke Vietnam pada akhir abad ke 11, Islam dibawa oleh pedagang dari India, Arab dan Persia yang singgah di Vietnam (Kamiruddin, Ismardi, Zulkifli & Ahmad, 2018). Dua pertiga penganut agama Islam di Vietnam merupakan masyarakat Cham yang merupakan kelompok minoritas di Vietnam. Mereka kebanyakan menetap di daerah Selatan seperti Provinsi Ninh Thuan, Binh Thuan, An Giang, Ho Chi Minh, Tay Ninh dan Dong Nai. Kelompok Muslim di Vietnam berasal dari tiga kelompok sebagai berikut:

pertama, kelompok Muslim Cham yang merupakan kelompok Muslim asli Vietnam. Kedua, umat Muslim yang berasal dari luar Vietnam yang biasanya datang dari pedagang-pedagang seperti Arab, India, Malaysia, atau bahkan Indonesia yang kemudian menikah dengan Muslim di Vietnam. Ketiga, umat Muslim yang berasal dari masyarakat Vietnam asli yang kemudian menganut agama Islam (mualaf), dan kebanyakan dari mereka masuk Islam melalui jalur pernikahan karena di Vietnam tidak ada larangan untuk menikah dengan mereka yang berbeda agama atau yang tidak menganut kepercayaan (Kamiruddin, Ismardi, Zulkifli & Ahmad, 2018).

Madzhab yang berkembang di Vietnam dikategorikan menjadi dua, yaitu; Madzhan Bani dan Madzhab Sunni (Kamiruddin, Ismardi, Zulkifli & Ahmad, 2018). Dua madzhab tersebut dianut oleh kelompok yang berbeda juga yaitu Cham Bani yang menganut madzhab Bani dan Cham Islam yang menganut madzhab Sunni. Dua kelompok tersebut merupakan penganut agama Islam dengan ritual yang cukup bertentangan. Masyarakat Cham Bani dalam ajarannya dipengaruhi oleh animisme, dinamisme dan paganisme, hal tersebut dikarenakan masyarakat Cham Bani mempercayai Tuhan mereka sebagai Po Auloah atau Tuhan Yang Maha Esa Allah. Cham Bani juga mempercayai adanya malaikat, kitab suci Al-Qur'an, para wali yang terdiri dari empat puluh imam dan dewa-dewa (Phu, 2006).

Cham Bani dalam praktik keagamaannya tidak melakukan ibadah shalat 5 waktu dalam sehari, mereka melakukan shalat pada hari Jum'at dan dilakukan sebulan satu kali dengan diwakilkan oleh imam mereka. Selain ibadah shalat yang cukup berbeda dengan

Islam pada umumnya, ibadah lain seperti puasa di bulan Ramadhan juga dilakukan dengan tata cara yang berbeda, puasa akan diwakilkan seperti shalat oleh imam atau *Acar* mereka. Cham Bani menganut agama Islam dengan praktik ibadah yang masih dipengaruhi oleh tradisi nenek moyangnya (Hindu). Cham Bani mengenal Ramadhan sebagai Ramuwan. Bulan ramuwan menjadi bulan terpenting pada kehidupan beragama mereka. Mereka meyakini pada bulan tersebut leluhur akan pulang kerumah-rumah mereka (Yoshimoto, 2012).

Masyarakat Cham Bani juga sangat mematuhi segala perkataan dari Imam mereka atau Mum yang mereka percaya sebagai penyelesaian segala masalah. Mum atau Imam memiliki keistimewaan tersendiri yaitu hanya mereka yang dapat memegang kitab suci, atau *Qur'en* (Ismardi, Zulkifli, 2017). Al-Qur'an yang biasa dibaca oleh masyarakat Cham Bani berbeda dengan Al-Qur'an yang umum dibaca oleh orang Islam. Pada masyarakat Cham Bani, Al-Qur'an mereka ialah manuskrip kuno dengan tebal 20 halaman. Walaupun Al-Qur'an mereka merupakan manuskrip namun isinya masih mirip dengan ayat-ayat pada Al-Qur'an pada umumnya seperti surah Al-Iklhas, Al-Fatihah dan lain-lainnya. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut diwariskan secara turun temurun oleh Imam atau *Acar*, dalam tradisinya masyarakat Cham Bani harus memilih salah satu dari keluarganya untuk mewakili keluarga mereka atau dijadikan sebagai *Acar*, kemudian mereka memiliki kewajiban untuk melestarikan semua aktivitas agama dan menulis Al-Qur'an. Meskipun *Acar* mampu membaca Al-Qur'an tapi banyak dari mereka tidak memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya (Ba, 2008).

Sedangkan kelompok Cham Islam mulai muncul di Vietnam pada awal tahun 1960-an. Banyak dari anggota Cham Islam merupakan masyarakat Cham Bani yang kemudian keluar dari Bani dan masuk ke dalam Cham Islam. Faktor utama banyaknya masyarakat Bani yang meninggalkan Cham Bani karena mulai menyadari bahwa praktik keagamaan yang dilakukan pada kelompok Cham Bani tidaklah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya (Sari, 2019). Praktik ibadah yang dilakukan oleh kelompok Cham Islam sama dengan praktik ibadah pada umumnya. Cham Islam menganut madzhab Sunni yang melakukan shalat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Setelah masyarakat Bani berpindah agama pada tahun 1960-an, mereka akan meninggalkan seluruh ritual pemujaan terhadap leluhur dan bergabung dengan Komunitas Islam yang ada untuk membangun masjid dan menyebarkan agama Islam yang sesungguhnya (Yoshimoto, 2012). Perpindahan masyarakat Cham Bani ke Cham Islam sempat menimbulkan konflik antara dua kelompok tersebut. Mualaf Bani akan dianggap terputus hubungan persaudaraannya ketika mereka masuk ke dalam Cham Islam karena telah meninggalkan ajaran nenek moyang mereka (Yoshimoto, 2010).

Masyarakat Cham Muslim di Vietnam Utara biasa melakukan model pembelajaran agama Islam di masjid, yang biasa mereka sebut sebagai madrasah. Pembentukan madrasah di masjid dilakukan karena tidak adanya pendidikan agama yang diterima oleh anak-anak Muslim. Anak-anak muslim hanya mendapatkan pelajaran umum karena pemerintah Vietnam tidak memberikan pelajaran agama, hal tersebut dikarenakan

pemerintah Vietnam tidak mengizinkan pendirian sekolah agama, pendidikan agama cukup dilakkan di tempat peribadahan (Hien, 2013), Madrasah biasanya dalam melakukan pelajaran agama akan dibagi ke beberapa waktu, seperti setelah Magrib hingga Isya yang merupakan kelas mengaji dengan melafalkan bacaan Al-Qur'an dengan menggunakan nada seperti tilawah atay murratal. Kemudian setelah Isya, pelajaran akan difokuskan pada pelajaran ushuluddin atau tauhid. Ada juga pelajaran agama yang dilakukan di pagi hari di jam 07.30 - 09.00, kelas pagi tersebut difokuskan pada pelajaran fiqih. Pelajaran agama di pagi hari dikhususkan pada anak-anak Muslim yang tidak sekolah pagi hari. Kemudian kelas di jam 09.30 - 10.30, kelas tersebut dikhususkan untuk pelajaran bahasa, seperti bahasa Melayu dan bahasa Arab (Khozin, 2019).

Pada masyarakat Muslim di Selatan, beberapa faktor menjadi penyebab sulitnya mendapatkan pengatehuan mengenai Islam, seperti; sulitnya ekonomi masyarakat Cham karena mereka berpendapatan rendah, sedangkan mereka harus menempuh perjalanan ke luar negara untuk belajar mengenai Islam. Kedua, Pendidikan Islam yang tidak diizinkan oleh pemerintah Vietnam menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan secara mudah. Ketiga, masyarakat Muslim di Selatan yang cenderung menutup diri dari masyarakat asing menjadikan mereka berfikir bahwa Islam hanya sebuah pemahaman kepercayaan antara manusia dengan Tuhan (Hien, 2013).

Sulitnya perekonomian masyarakat Muslim juga dilatarbelakangi oleh sistem pekerjaan yang tidak mentoleransi waktu untuk melakukan ritual keagamaan,

seperti sholat di jam kerja. Sulitnya melakukan sholat juga dirasakan oleh mahasiswa, siswa atau karyawan swasta ataupun negeri karena tidak adanya peraturan yang mengizinkan mereka melakukannya. Kesulitan tersebut menjadikan kebanyakan Muslim di Vietnam memilih pekerjaan dengan gaji rendah seperti bertani atau berternak (Chung & Tuán, 2022).

Kebijakan Agama dan Komunisme di Vietnam

Dalam sejarah penerapan komunisme dalam suatu negara, agama dan komunisme selalu berujung pada sebuah ketegangan. Vietnam yang menganut pandangan Marxis-Leninis menganggap agama sebagai sesuatu yang bersifat tidak ilmiah, takhayul dan sesuatu yang tidak memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara yang menyebabkan agama disingkirkan dari urusan kenegaraan (Hasram, 2020). Pada periode setelah penyatuan Vietnam (*reunifikasi*), Komite Urusan Agama mulai melakukan agenda pembetulan negara sekuler yang menghargai agama. Dalam agendanya tersebut organisasi keagamaan berada di bawah naungan Komite Urusan Agama dan mulai melakukan beragam kegiatan keagamaan seperti pertemuan antar pimpinan agama dan perayaan hari-hari besar agama (Hasram, 2020).

Prinsip besar yang diterapkan dalam pemerintahan komunis yaitu membentuk masyarakat tanpa Tuhan (*atheist society*). Prinsip tersebut merupakan ajaran marxisme mengenai ateisme. Seperti dalam yang Lenin tulis mengenai atheism: "ateisme merupakan sesuatu yang secara alami dan tidak terpisahkan dari marxisme, baik dalam teori maupun

praktik ajaran mengenai sosialisme” (Hasram, 2020).

Agama setelah masa reformasi mengalami perubahan yang signifikan, agama mulai dianggap penting dan merupakan kebutuhan dari setiap individu yang dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan negara. Agama kemudian secara resmi diatur dalam konstitusi Vietnam pada 15 April 1992, dimana pada pasal 70 dijelaskan sebagai berikut:

“Warga negara berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama, menganut suatu agama ataupun tidak. Semua agama sama di hadapan hukum. Tempat ibadah dan agama dilindungi undang-undang. Tidak boleh melanggar kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama atau memanfaatkan keyakinan atau agama untuk melakukan pelanggaran hukum dan kebijakan Negara”.

Dalam pasal tersebut ditekankan bahwa adanya kebebasan beragama dan perlindungan terhadap penganut agama untuk melakukan segala urusan agama dan kepercayaannya walaupun konteks kebebasan yang dimaksudkan tetaplah kebebasan agama dalam prinsip komunis. Kalimat terakhir pada pasal tersebut menekankan secara tegas bahwa pemerintah memberikan kebebasan beragama hanya untuk kepentingan spiritual saja, agama tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah komunis Vietnam (Hasram, 2020). Melalui pengawasan ketat ini, Vietnam berusaha untuk mengendalikan praktik keagamaan agar tetap sesuai dengan definisi agama yang berlaku di

Vietnam dan kepercayaan yang individualis. Menurut Salemink dalam (Roszko, 2021) pengontrolan dan pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah komunis Vietnam untuk memastikan agama dan praktik keagamaan tidak menjadi sebuah tantangan terhadap legitimasi dan otoritas moral Vietnam.

Dalam Dekrit No. 234-SL tahun 1955 dimulai di Vietnam Utara tercantum kalimat yang menggambarkan kontrol ketat terhadap agama. Dalam (Roszko, 2021) kalimat tersebut berbunyi :

“Undang-undang akan menghukum setiap orang yang mengambil keuntungan yang diambil dari agama yang akan merusak perdamaian, persatuan, kemerdekaan dan demokrasi, menganjurkan perang atau penghancuran persatuan, menghalangi orang yang menganut agama atau keyakinan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara, melanggar kebebasan dalam berkeyakinan serta berfikir orang lain atau melakukan kegiatan ilegal”.

Dalam pasal tersebut, menurut (Liên, 2013) dapat diartikan bahwa pemerintah dapat menghentikan aktivitas keagamaan atau praktik keagamaan, penyitaan property keagamaan serta menangkap pemimpin agama.

Kebijakan-kebijakan agama di Vietnam tidak lain dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Vietnam yang kemudian dengan dikeluarkannya kebijakan doi moi tahun 1986 Vietnam resmi bergabung dalam pasar internasional. Hal tersebut menjadikan Vietnam meninggalkan keinginan mereka untuk menciptakan masyarakat komunis dan atheis. Untuk bergabung kedalamnya, menurut (Liên, 2013) pemerintah Vietnam juga harus

meyakinkan pihak luar bahwa “Vietnam sedang dalam usaha menuju negara yang modern dengan supremasi hukum termasuk kebebasan dalam beragama”. Disaat yang bersamaan jatuhnya rezim komunis Eropa Timur dan Tengah karena peran Gereja Katolik menjadikan pemerintah komunis Vietnam kembali merasa awas terhadap kekuatan agama. Oleh sebab itu, Vietnam pada tahun 1992 kembali berusaha untuk melakukan pembatasan kebebasan beragama dengan ditambahkan ketentuan pada konstitusi. Menurut (Liên, 2013) pada konstitusi yang baru tersebut bermakna bahwa setiap individu dengan apapun itu keyakinan atau agamanya adalah setara di depan hukum, hal itu menjadi perlindungan kepada setiap individu di Vietnam yang menganut keyakinan atau agama.

Pada inti dasar isi kebebasan berkeyakinan dan beragama di Vietnam saat ini yaitu (Ban Tôn Giáo Chính Phủ, 2022);

- 1) Kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan hak dari setiap individu.
- 2) Hak dari setiap organisasi keagamaan dan afiliasi organisasi keagamaan.
- 3) Hak dalam menggunakan kitab suci serta keyakinan beragama masyarakat dalam tahanan. Dalam hal ini mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam tahanan memiliki hak untuk menggunakan kitab suci serta mengungkapkan keyakinan atau agama mereka. Secara rinci dijelaskan dalam Keputusan 162 pada (Ban Tôn Giáo Chính Phủ, 2022) bahwa penggunaan kitab suci bagi masyarakat yang berada

dibawah tahanan pemerintah diperkenankan menggunakan kitab suci yang diterbitkan dalam bentuk buku dan telah didistribusikan secara sah. Kebijakan ini juga berlaku bagi mereka yang berada di dalam panti asuhan atau lembaga belajar wajib. Isi kebijakan agama ini merupakan kebijakan baru yang didasari oleh rasa kemanusiaan serta tanggung jawab pemerintah komuni Vietnam dalam memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan dan jaminan kebebasan beragama bagi setiap individu termasuk mereka yang sedang menjalani masa tahanan, kehidupan di panti asuhan atau lembaga belajar wajib.

- 4) Pemerintah Vietnam yang bertanggung jawab kepada kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- 5) Setiap organisasi atau individu memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.
- 6) Tindakan-tindakan yang dilarang. Dalam pasal 14 pada UUD tahun 2013, menetapkan Tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, antara lain: Tindakan diskriminasi terhadap agama atau keyakinan, pemaksaan, penyuapan atau bahkan menghalangi seseorang untuk menganut suatu agama atau keyakinan, melakukan penghinaan terhadap agama atau keyakinan serta kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan yang dapat merusak pertahanan negara, keamanan, kedaulatan, ketertiban serta keselamatan dan merugikan moralitas sosial, perpecahan etnis

- 7) atau agama, memisahkan mereka yang tidak menganut agama dengan mereka yang menganut agama serta memisahkan mereka yang memiliki keyakinan atau agama berbeda dan memanfaatkan agama atau keyakinan untuk keperluan pribadi.
- 8) Peraturan mengenai pendaftaran kegiatan keagamaan. Beberapa persyaratan dalam melakukan pendaftaran kegiatan agama antara lain: memiliki tempat kegiatan keagamaan yang sah, memiliki perwakilan yang berwarga negara Vietnam dan secara tetap tinggal di Vietnam, tidak memiliki catatan criminal atau memiliki dakwaan terkait tindak pidana.
- 9) Peraturan penerbitan surat atau sertifikat tanda daftar kegiatan keagamaan. Setelah memiliki sertifikat tersebut, organisasi dapat melakukan upacara keagamaan, kegiatan keagamaan, dakwah atau pembinaan ajaran-ajaran agama.
- 10) Peraturan mengenai pengakuan organisasi keagamaan, status hukum dan afiliasi organisasi.
- 11) Peraturan kegiatan keagamaan bagi warga asing yang sah tinggal di Vietnam. Warga asing berhak mengamalkan agama, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, menggunakan lokasi resmi, mengundang pejabat atau pejabat asing dan melakukan pembelajaran pada organisasi keagamaan di Vietnam.
- 12) Peraturan mengenai kegiatan keagamaan, penerbitan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, amal dan

kegiatan kemanusiaan pada organisasi keagamaan.

- 13) Penanganan pelanggaran hukum agama dan keyakinan. Ketika organisasi keagamaan didapati melakukan pelanggaran maka mereka akan ditangani sesuai dengan tingkat keparahannya dan dapat dituntut untuk tanggung jawab pada kerusakan dan ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat atau pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran.

Dikeluarkannya resolusi No. 25-NQ/TW pada 12 Maret 2003 yang berisi penegasan bahwa aktivitas keagamaan harus bertujuan untuk memperkuat persatuan seluruh umat beragama, mendorong kekuatan dari seluruh bangsa, melaksanakan perjuangan industrialisasi dan modernisasi negara, membangun dan membela Tanah Air demi cita-cita rakyat, negara dan masyarakat yang adil demokratis dan beradab. Resolusi tersebut juga menekankan 5 pandangan kebijakan terhadap agama (Ban Tôn Giáo Chính Phủ, 2022), seperti;

- 1) Agama merupakan kebutuhan spiritual setiap individu dan akan membersamai pembangunan sosialisme bangsa, agama beroperasi di dalam kerangka hukum dan setara di mata hukum.
- 2) Partai dan negara secara teratur melaksanakan kebijakan persatuan nasional dengan menyatukan masyarakat dengan agama yang beragam, menyatukan umat beragama dan non beragama, melestarikan setiap nilai-nilai

- 3) positif dalam tradisi leluhur, diskriminasi terhadap umat beragama sangat dilarang, dan tidak diperbolehkan menggunakan agama untuk kegiatan takhayul atau yang bertentangan dengan hukum negara serta dilarang menimbulkan perpecahan antar umat/suku.
- 4) Cita-cita rakyat, negara yang kuat, masyarakat adil dan demokratis serta beradab merupakan sebuah titik temu seluruh umat beragama di tujuan yang sama. Seluruh warga negara maupun agama atau keyakinannya memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan membangun Tanah Air.
- 5) Struktur organisasi dan pejabat khusus yang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan kebijakan agama harus diperkuat dan disempurnakan. Kebijakan agama merupakan tanggung jawab seluruh sistem pemerintahan.
- 6) Setiap individu yang meyakini suatu agama atau keyakinan berhak untuk bebas melakukan kegiatan keagamaan di rumah atau tempat peribadahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Organisasi keagamaan yang telah diakui oleh pemerintah diperbolehkan untuk beroperasi secara hukum serta mendapatkan perlindungan hukum. Melakukan segala aktivitas keagamaan, membuka sekolah pelatihan pemimpin agama, penerbitan kitab suci serta pelestarian dan perbaikannya dan pembangunan organisasi fasilitas ritual keagamaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. Dilarang memanfaatkan agama sebagai sarana penyebaran kegiatan atau acaran sesat serta takhayul dan tidak melakukan pemaksaan terhadap individu untuk menganut agama atau keyakinan (Ban Tôn Giáo Chính Phủ, 2022).

Sebagai negara dengan ideologi komunis, Vietnam dalam menerapkan kebijakan agama berpaku pada sifat-sifat komunis dengan kontrol yang ketat dan dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat beragama dalam pembangunan negara. Dalam praktik kontroling yang dilakukan pemerintah Vietnam, setiap aktivitas keagamaan harus dilaporkan kepada pemerintah minimal pada tingkat distrik (Hasram, 2020).

Minoritas Muslim dalam Kebijakan Agama Vietnam

Sebagai suatu kelompok minoritas di negara Komunis dengan kebijakan agama ala komunis, kegiatan keagamaan pada masyarakat Muslim tentu mengalami beberapa keterbatasan. Menurut Than Than Hong dalam (Khozin, 2019), pemerintah Vietnam belum bisa secara penuh memberikan kebebasan kepada kelompok Muslim untuk berkembang. Dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid, polisi Vietnam akan mengawasi di sekitar masjid secara diam-diam, mereka akan mengawasi setiap orang yang datang ke masjid baik untuk melakukan ibadah shalat ataupun aktivitas keagamaan lainnya.

Keterbatasan masyarakat Muslim di Vietnam dalam melakukan kegiatan pembelajaran juga menjadi masalah yang cukup serius belakangan ini. Muslim di Vietnam banyak mengalami kesulitan

dalam pendidikan agamanya, hal tersebut dikarenakan tidak adanya ruang untuk melakukan pengembangan dakwah baik melalui acara keagamaan ataupun lembaga pendidikan. Agama yang dianggap bukan sebagai urusan pemerintah menjadi faktor lain sulitnya Pelajaran mengenai agama khususnya agama Islam tidak diajarkan sama sekali. Pembelajaran agama Islam biasa dilakukan diluar pendidikan formal yang biasa dilakukan di madrasah (Khozin, 2019).

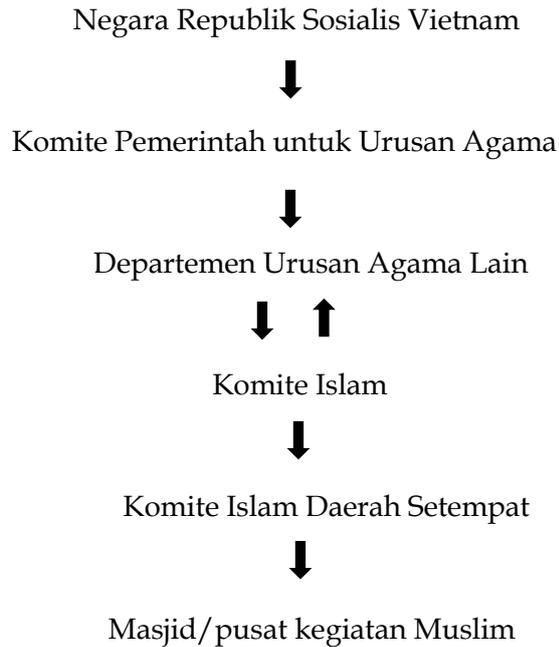
Pemerintah Vietnam tidak memberikan larangan terhadap berdirinya madrasah sebagai tempat pembelajaran agama Islam di Vietnam. Bahkan pemerintah Vietnam biasanya akan menghadiri kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh madrasah seperti pada hari besar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat Muslim memiliki dua opini mengenai kehadiran pemerintah dalam kegiatan keagamaan. Pertama, hadirnya pemerintah dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi antara masyarakat beragama dengan pemerintah Vietnam, kemudian yang kedua, hadirnya pemerintah Vietnam dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan keagamaan yang dilakukan, apakah kegiatan tersebut memiliki unsur menentang pemerintah Vietnam atau tidak (Khozin, 2019).

Kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah komunis Vietnam pada hari-hari besar Islam biasanya akan di hadiri oleh Komite Pemerintah untuk Urusan Agama yang akan memberikan ucapan pada kunjungan mereka ke tempat-tempat dilakukannya perayaan hari besar seperti Maulid Nabi atau menjelang bulan suci Ramadhan. Pemerintah yang datang tidak hanya sekedar memberikan ucapan tetapi

juga membawa parcel atau hadiah yang biasanya berisi bahan-bahan sembako. Pada bulan Ramadhan pemerintah turut hadir untuk mengikuti buka puasa bersama. Menurut Ustad Musa dalam (Hasram, 2020), hadirnya pemerintah ditengah minoritas Muslim menjadikan mereka merasa dianggap sebagai kelompok agama yang sama dengan agama mayoritas disana, hal tersebut juga membawa rasa aman bagi minoritas Muslim. Kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah komunis Vietnam merupakan sebuah usaha pemerintah untuk memperbaiki hubungan agama dengan pemerintah komunis Vietnam.

Sebagai negara komunis, Vietnam akan mengatur setiap tempat peribadahan secara ketat dan teratur. Masjid-masjid atau surau di Vietnam harus di daftarkan kepada pihak berwenang lengkap dengan daftar pengurus masjid atau imam mulai dari mereka ditunjuk sebagai imam hingga pergantian imam selanjutnya. Pada bulan Ramadhan, setiap Muslim yang ingin melakukan ibadah iktikaf harus mendaftarkan nama mereka kepada imam untuk diteruskan kepada pemerintah. Ceramah atau khutbah yang akan di sampaikan oleh imam wajib diserahkan kepada pemerintah Vietnam secara tertulis untuk diperiksa. Donasi yang didapatkan oleh masjid dari pihak luar juga wajib secara rinci di catat untuk diserahkan kepada pemerintah Vietnam. Aturan tersebut berlaku kepada seluruh tempat peribadahan yang ada di Vietnam (Haque, 2019).

Posisi Islam dalam negara komunis Vietnam dapat dilihat dari tabel berikut (Hasram, 2020):



Segala urusan yang berkaitan dengan agama Islam akan diurus oleh bagian Departemen Urusan Agama Lain. Lembaga tersebut yang nantinya akan menghubungkan urusan masyarakat Islam di Vietnam dengan pemerintah. Di bawah departemen Urusan Agama Lain, komite Islam dibangun di empat provinsi dengan penduduk Muslim terbanyak untuk mempermudah komunikasi. Komite Islam di wilayah Ho Chi Minh yang dibangun pada tahun 1992, komite Islam di An Giang yang dibangun pada tahun 2004, komite Islam di Tay Ninh yang dibangun pada tahun 2010 dan komite Islam di An Giang yang merupakan komite kedua disana dibangun pada tahun 2012 (Haque, 2019). Keempat komite Islam tersebut berfokus menaungi masyarakat Muslim Cham Islam, sedangkan masyarakat muslim Cham Bani dinaungi oleh Dewan Ulama Muslim Bani yang dibangun pada tahun 2006 (Hasram, 2020).

Komite Islam daerah tersebut menjadi induk bagi masyarakat Muslim di Vietnam yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.

Melalui struktur tersebut, pemerintah Vietnam melakukan pengawasan terhadap agama dimana setiap kegiatan harus dilaporkan kepada pihak berwenang dengan tingkat paling rendah pada komite Islam daerah (Haque, 2019) (Hasram, 2020).

Organisasi Islam di Vietnam banyak dibentuk sebagai bentuk solidaritas dan silaturahmi diantara mereka. Organisasi Islam di Vietnam kemudian dalam perkembangannya terbentuk dengan model organisasi yang modern dan atas persetujuan dari pemerintah komunis Vietnam. Organisasi-organisasi Islam yang merupakan non-pemerintah mulai banyak diizinkan oleh pemerintah komunis Vietnam sebagai bentuk dari kebijakan kebebasan beragama. Organisasi non-pemerintah tersebut mendapatkan izin untuk berdiri melalui surat Keputusan dan ditandatangani oleh pejabat komite pemerintah urusan agama. Hal tersebut menandakan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama diatur ketat oleh pemerintah komunis Vietnam (Hasram, 2020).

Meskipun ketatnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat beragama termasuk masyarakat Muslim di Vietnam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim terus berjalan dengan lancar. Pemerintah komunis Vietnam justru memberikan perhatiannya terhadap kelompok Muslim sebagai kelompok minoritas dengan menyediakan fasilitas pendidikan. Layaknya kelompok minoritas lainnya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah komunis Vietnam belum sepenuhnya cukup untuk memberikan pendidikan khususnya pada fasilitas pendidikan agama di tingkat tinggi, masyarakat Muslim di Vietnam masih

harus melakukan pendidikan agama di madrasah-madrasah setempat (Lestari, 2015).

Sebagai kelompok minoritas di tengah banyaknya masyarakat yang tidak menganut agama dan di negara dengan ideologi komunis, Muslim di Vietnam jauh dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa mereka mengalami berbagai tindakan diskriminasi atau penderitaan. Pemerintah komunis Vietnam juga memberikan izin kepada lembaga-lembaga non-pemerintah yang bertugas khusus untuk mengatur sertifikasi halal. Tercatat tujuh Lembaga sertifikasi halal di Vietnam, yaitu; Halal Certification Agency, Islamic Community of Ho Chi Minh City, Islamic Community of An Giang Province, Halal Vietnam, Halal Authority- Vietnam, Halal Vietnam Certification Service dan International Halal Certification Organization Vietnam. Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan Kerjasama dengan lembaga halal internasional seperti Majelis Ulama Indonesia. Meskipun lembaga-lembaga Halal di Vietnam sudah banyak berdiri, kewajiban bagi setiap pemilik dari sebuah tempat makan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal tidak diwajibkan. Biaya yang tinggi menjadi alasan mengapa sertifikasi halal masih belum banyak dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat Muslim di Vietnam memastikan bahwa makanan khususnya daging yang dibeli halal dengan membeli daging yang dijual di masjid Komite Islam (Hasram, 2020) (Haque, 2019).

Kesimpulan

Sebagai kelompok minoritas, Muslim di Vietnam tetap dapat melakukan kegiatan keagamaan seperti biasa, meski dalam realitanya dalam melakukan

berbagai kegiatan keagamaan mereka diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah komunis Vietnam hal tersebut juga menjadi suatu keterbatasan bagi masyarakat Muslim untuk dengan bebas sepenuhnya dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Kebijakan-kebijakan agama di Vietnam dilatarbelakangi oleh keinginan mereka untuk bergabung pada pasar bebas dunia, sehingga untuk kepentingan ekonomi negara, pandangan mereka terhadap agama lambat laun berubah seiring dengan kesadaran pemerintah komunis Vietnam bahwa agama merupakan kebutuhan dari setiap individu yang dapat menjadi dampak positif terhadap pembangunan negara. Pemerintah komunis Vietnam yang menganut ideologi komunis menganggap agama dapat menjadi alasan bagi masyarakat Vietnam untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah komunis Vietnam sehingga kebijakan agama di Vietnam dibuat layaknya kebijakan ala komunis yang ketat dan mengontrol. Hubungan antara agama dan komunis yang selalu berjumpa pada ketegangan menjadi alasan pemerintah komunis Vietnam terus melakukan perbaikan terhadap ketegangan hubungan tersebut. Pemerintah komunis Vietnam biasa melakukan kunjungan secara rutin pada hari-hari besar agama termasuk pada hari-hari besar Islam, seperti maulid nabi ataupun bulan Ramadhan. Mereka biasanya membawa parcel sebagai jembatan antara pemerintah komunis Vietnam dengan kelompok agama.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) Di Italia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis*

- Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63.
<https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Ba, T. P. (2008). Bani Islam Cham in Vietnam. *CIAS Discussion Paper No.3 : Islam at the Margins: The Muslims of Indochina*, 3, 24–33.
- Ban Tôn Giáo Chính Phủ. (2022). *Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo ở Việt Nam. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ*.
- Chung, H. Van, & Tuấn, C. V. (2022). THE ISLAMIC COMMUNITY IN CONTEMPORARY VIETNAM: MAIN FEATURES AND CURRENT ISSUES. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 3(1).
<https://doi.org/10.22373/ijihc.v3i1.1663>
- Haqae, M. G. F. (2019). *Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya* (L. Febrina (ed.)). Gramata Publishing.
- Hasram, K. (2020). Birokratisasi Islam di Indocina Meninjau Ulang Hubungan Negara dan Minoritas Muslim. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hien, L. T. (2013). *Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Suku Champa di Ninh Thuan Vietnam di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ismardi, Zulkifli, D. (2017). *Pengaruh Hindu Terhadap Islam Bani (Studi Muslim Champa, Vietnam)* (p. 32).
- Kamiruddin, Ismardi, Zulkifli, & Ahmad, A. (2018). The Influence Of Hinduism Toward Islam Bani: Study Of Religious Thought Of Muslim Champa, Viet Nam. *ILMU USHULUDDIN*, 5(1), 1–14.
<https://doi.org/10.15408/iu.v5i1.12402>
- Khozin, W. (2019). Religious and Religious Education in Vietnam : a Case Study of Madrasah Al Nur dan Darussalam Boarding School. *Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(3), 256–268.
- Lestari, S. (2015). *Kehidupan Warga Muslim di Vietnam*. BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/07/150708_majalah_lipkhas_muslim_vietnam
- Liên, C. T. T. (2013). Communist State and religious policy in Vietnam: A historical perspective. *Hague Journal on the Rule of Law*, 5(2), 229–252.
<https://doi.org/10.1017/S1876404512001133>
- Phu, B. T. (2006). The Cham Bani of Vietnam. *American Journal of Islam and Society*, 23(3).
<https://doi.org/10.35632/ajis.v23i3.1611>
- Roszko, E. (2021). Controlled Religious Plurality: Possibilities for Covenantal Pluralism in Vietnam. *Review of Faith and International Affairs*, 19(3), 89–103.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1954421>
- Sari, B. R. (2019). Contesting Religious Beliefs: The Experience of the Cham in Vietnam. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 2(2).
<https://doi.org/10.32795/ijis.vol2.is2.2019.449>
- Yoshimoto, Y. (2010). A Study of Negotiating Process over Islamness and Ethnic Elements a Case of Cham Muslim in Vietnam. 文化交渉による変容の諸相, 223–247.
- Yoshimoto, Y. (2012). A study of the Hôi giáo Religion in Vietnam: With a reference to Islamic religious practices of Cham Bani. *Southeast Asian Studies*, 1(3), 487–505.